

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-V, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andayani Budisetyowati, Dwi , 2009, *Hukum Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Roda Inti Media, Jakarta.
- Ashsofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Aziz, Azhari , 2015, *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bahar dkk, Imam, 1998, *Risalah Sidang Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI) , Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 22 Mei-22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Bambang Prakoso, Kesit, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, FH UII Press, Yogyakarta
- Brotodihardjo, Santoso, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- Davey, Kenneth, 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus et.al, 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fauzan, M., 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Gede Pantja Astawa, I , 2008, *Problematisa Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Held, David, 2004, *Demokrasi dan Tatahan Global, dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Hossein, Benyamin, 2009, *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- , 2013, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hutabarat, Martin H. (Ed), 1996, *Hukum dan Politik di Indonesia: Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ismail, Tjip, 2013, *Analisi dan Evaluasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Irianto, Edi Slamet, 2009, *Pajak Negara dan Demokrasi: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Kamang, Viktor, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2008, *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Kusmanto, Bambang, dkk, 1992, *Keuangan Negara*, Intermedia, Yogyakarta.
- Liang Gie, The, 1994, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Jilid II*, Liberty, Yogyakarta.
- Lubis, Solly, 1983, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung.
- Lutfi, Achmad, 2013, *Devolusi Pajak Bumi dan Bangunan: Tantangan dan Peluang Penguatan Taxing Capacity untuk Mendorong Daya Saing Daerah*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muchsan, 2004, *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran: Kajian Yuridis Undang-Undang No.2 Tahun 1999*, UII Press, Yogyakarta.

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta
- Nellis, Rodinelli, 1986, *Assesing Decentralitation Polities in Developing Countries: The Case of Cautious Optimism in Development Policies Review*, Sage Publication, London.
- Ratmoko, 1982, *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riwu Kaho, Josef, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Centre of Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Riyanto, Sigit dkk, 2013, *Keterampilan Hukum : Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rizal, Jufrina dan Shidarta (Ed), *Pendulum Antinomi Hukum: Antologi 70 Tahun Valerine J.L. Kriefkhoff*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Slamet Irianto, Edi dan Syarifudin Jurdi, 2005, *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Slamet Irianto, Edi, 2009, *Pajak Negara dan Demokrasi: Konsep dan Impelementasinya di Indonesia*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Soeboechi, Imam, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedargo, 1965, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Eresco Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2012, UI-Press, Jakarta.
- Solikhin, Nur, 2009, *Awasi Perda Berdayakan Daerah Seri Panduan Pemantauan Legislasi Daerah*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta
- Suandy, Erly, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Surianingrat, Bayu, 1980, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisa*, Dewa Ruci Press, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijaya, H.A.W. , 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yani, Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D).

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 59).

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2).

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9)

JURNAL

Robert Endi Jaweng, 2010, Memperkuat Otonomi Fiskal Daerah,” *Jurnal Analisis Centre For Strategic And International Studies*”, Volume 39 No. 4 Desember 2010.

Loefi Bachtiar Almaghf, *et.al*, 2016, “Studi Pemikiran Penerapan *Tax Earmarking* Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kota Malang”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.9 No.1 2016*.

SKRIPSI

Poetri Mutiara Bela, 2010, *Analisis Earmaking Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Earmaking Tax di DKI Jakarta)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia, Jakarta

INTERNET

Anwar Syahdat, 2012, “Mengapa PBB-P2 Dialihkan?”, Majalah Defis Media Komunikasi dan Informasi Desentralisasi Fiskal Edisi 3 Tahun 2012, <http://www.djpk.depkeu.go.id/ebook/book/9-media-defis-edisi-3-tahun-2012/1-majalah> (online), diakses tanggal 2 Februari 2016.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012, “Kajian Kelayakan Penerapan *Earmarking Tax* di Indonesia”, <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20131028104645787550783>(online), diakses tanggal 18 Juli 2016.

Budi Sitepu, 2012, “Pendaerahan PBB-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dan Implementasinya”, Majalah Defis Media Komunikasi dan Informasi Desentralisasi Fiskal Edisi 3 Tahun 2012, <http://www.djpk.depkeu.go.id/ebook/book/9-media-defis-edisi-3-tahun-2012/1-majalah> (online), diakses tanggal 2 Februari 2016

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, 2014, “Deskripsi dan Analisis APBD 2014”, www.djpk.kemenkeu.go.id (online), diakses 23 Oktober 2015.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014, “Buku Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan”, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (online), diakses 9 Desember 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online atau dalam jaringan (daring), [http://kbbi.web.id/atur\(online\)](http://kbbi.web.id/atur(online)),

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/upaya-pemerintah-mencapai-kesinambungan-fiskal> (online), diakses 29 November 2015

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Profil Daerah Kabupaten Kulon Progo, [http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Kondisi-Umum_6_hal\(online\)](http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Kondisi-Umum_6_hal(online)), 14 April 2016.

Pemerintah Kabupaten Sleman, 2016, “Profil Daerah Kabupaten Sleman”, [http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah#\(online\)](http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah#(online)), 09 April 2016.

Sigit Murwito, 2014, “Sistem Closed List UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Optimalisasi Penerimaan Daerah”, Brief Publikasi Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Edisi Oktober-Desember 2014, <http://www.kppod.org/index.php/en/publikasi/kppod-brief> (online), diakses tanggal 23 Oktober 2015.

Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, 2014, “Kajian Untuk Mendukung Naskah Akademik Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2009 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk)”, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/tadf> (online), diakses 09 Desember 2015.

Tim Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), 2014, *Laporan Penelitian Evaluasi Perda Pungutan di Era UU Nomor 28 tahun 2009*, www.kppod.org (online), 23 Oktober 2015.